



PROSIDING SAMASTA

Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia

HEGEMONI PEMERINTAH SERTA TEKANAN MASYARAKAT SEBELUM REFORMASI TERHADAP WARGA TIONGHOA DALAM NOVEL *DIMSUM TERAKHIR* KARYA CLARA NG

Rizqi Renaldi¹⁾ Novi Diah Haryanti²⁾

¹⁾ PBSI, FITK, UIN Jakarta

²⁾ PBSI, FITK, UIN Jakarta

Diterima: 20 November 2021

Direvisi: 4 Desember 2021

Disetujui: 12 Desember 2021

ABSTRAK

Novel Dimsum Terakhir adalah salah satu Novel populer yang membahas keberagaman Etnis yang ada di Indonesia terutama etnis Tionghoa. Novel dimsum terakhir ini menceritakan satu keluarga yang memiliki 4 anak kembar yang terlahir dari sebuah keluarga Tionghoa asli yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang sejak lama dilakukan oleh etnis Tionghoa. Pada dasarnya sebuah keberagaman Etnis seharusnya menjadi sebuah kebanggaan karena adanya kekayaan yang dialami oleh negara itu sendiri. Namun, terkadang negara itu sendiri kurang menghargainya adanya keberagaman, adanya diskriminasi, berawal dari para petinggi negara lalu merambat kepada warga biasa (sipil). Secara garis besar seharusnya pemerintah yang memiliki peran besar menjadi sewenang-wenangnya. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana gambaran perlakuan politik pemerintah yang memegang kendali negara dan masyarakat Non-Tionghoa dengan Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: *Hegemoni, Orde baru, Orde lama, Tionghoa, kebudayaan, politik*

PENDAHULUAN

Berkembangnya karya sastra di Indonesia membuat semakin bebasnya orang dalam berkarya tidak mengenal siapa yang akan di buat, dalam sebuah pendapat ada yang mengatakan sastra itu bebas. Hingga karya sastra telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan bermasyarakat sampai saat ini. Pada zaman yang semakin berkembang ini membuat apapun dapat

dihubungkan dengan pemerintahan. Masalah sosial yang ada pada setiap karya sastra memiliki sentimentasi terhadap politik, khususnya novel pada tahun sebelum 2000an hingga novel yang sudah masuk era 2000an. Masalah kebudayaan masih erat pada karya sastra terutama novel yang dikeluarkan pada saat itu. Bukan permasalahan kebudayaan yang menjadi masalah utama, namun permasalahan adanya pemetaan kebudayaan dalam pembentukan

peraturan juga menjadi sebuah masalah. Tercermin dari bagaimana deskriminasi pemerintahan orde baru pada saat itu terhadap kaum etnis Tionghoa.

Sampai sekarang keberdampingan orang pribumi atau Indonesia asli dengan etnis Tionghoa masih menjadi sebuah permasalahan yang mengandung unsur Suku, Ras dan Agama. Terbukti dari bagaimana peraturan yang telah dibuat serta praktik-praktik yang dibuat untuk khusus warga Tionghoa pada saat itu. Terlihat bagaimana Hegemoni yang dilakukan negara untuk para etnis Tionghoa. Hegemoni yang dilakukan pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang menekankan pada bagaimana cara masyarakat sosial terhadap sastra itu sendiri. konsep teori sosiologi Sastra didasarkan pada dalil bahwa karya sastra diciptakan oleh seorang pengarang di mana pengarang itu sendiri merupakan *a salient being*, yakni makhluk yang mengalami dan menjadi bagian dalam kehidupan empiris sosial kemasyarakatan. (Yohanes Sehandi, 2016)

Keberlangsungan sosiologi sastra memiliki banyak cabang, termasuk di dalamnya pendekatan-pendekatan terhadap karya sastra yang berada di dunia. Menyangkut tentang sosiologi sastra sebenarnya dasar filosofis pendekatan sosiologi sastra adalah adanya hubungan hakiki antara karya sastra dengan masyarakat. (Nyoman, 2007). Pemahamannya adalah bagaimana karya sastra itu bisa masuk kedalam masyarakat itu sendiri terutama pada masyarakat yang

terhadap etnis Tionghoa terlihat pada zaman pemerintahan Orde baru, Di Indonesia pada saat itu tidak boleh berkreasi, berekspresi dan tidak boleh menduduki kursi pemerintahan.

Banyak sekali peraturan yang mengikat untuk warga Tionghoa yang ada di Indonesia pada saat itu. Novel *Dimsum Terakhir* ini akan menceritakan bagaimana tidak adanya keadilan serta hegemoni yang dilakukan pemerintah sebelum Reformasi terhadap warga etnis Tionghoa. Hingga dapat dikatakan bahwa mereka (Etnis Tionghoa) sampai terampas haknya di Indonesia ini.

multikultural dalam suatu daerah. Seperti pada tahun 1965 sampai 1998 yang kita ketahui itu adalah pada masa sebelum Reformasi yaitu masa Orde Lama dan Orde Baru.

Orde lama adalah istilah yang diciptakan oleh Orde Baru. Orde Lama ini sebenarnya buatan orang yang Tidak suka atas kepemimpinan Soekarno yang dinamai Orde Revolusi. Berlangsung dari 1945-1968, masuk pada Orde Baru, Orde Baru adalah nama era pada masa kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun setelah adanya Surat perintah sebelas Maret (Super Semar). Pemerintahan ini berlangsung pada tahun 1965-1998. Masa Reformasi sebenarnya adalah gerakan yang dilatarbelakangi oleh mahasiswa pada tahun 1998 yang melihat adanya ketidakadilan pada pemerintahan Soeharto Dalam novel *Dimsum Terakhir* menekan pada adanya ketidakadilan terhadap ras tertentu, kami menggunakan teori sosiologi sastra hegemoni Gramsci,

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk meneliti bentuk politik, kultural, dan ideologis tertentu yang lewatnya dalam suatu masyarakat yang ada, suatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu yang berbeda dari bentuk-bentuk dominasi yang bersifat memaksa. (Sehandi, 2016) Sama seperti yang akan kami analisis objek pusat analisisnya adalah pemerintahan atau

kekuasaan itu sendiri. Konsep-konsep yang menjadi titik tekan pada analisisnya adalah identifikasi kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial dominan sebagai kelas sosial sebagai pusat pemerintahan (kekuasaan) yang mengembangkan hegemoni dan kelas sosial subordinat dalam membangun aliansi hegemoni dengan kelas-kelas sosial lainnya. (Kurniawan, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jatuhnya rezim Orde Baru juga ditandai juga menjadi tanda kembalinya kebebasan politik Indonesia, termasuk munculnya *civil society*. Pencabutan berbagai pembatasan atas partisipasi dan aktivisme politik yang telah berlaku selama 32 tahun membuka kran lahirnya banyak partai politik, kelompok-kelompok aksi dan organisasi-organisasi non pemerintah (Ornop). (Hoon, 2012) Namun, sebelum jatuhnya tonggak Orde Baru selama 32 tahun Etnis Tionghoa seakan-seakan mati dalam peradaban Indonesia. Dokumentasi tentang siapa (atau lembaga mana) saja yang telah menjaga dan memelihara bahasa dan budaya Tionghoa selama masa orde baru amat terbatas, karena penampilan budaya dan tradisi tionghoa di depan umum selama 32 tahun dilarang secara resmi, sekolah-sekolah Tionghoa ditutup dan barang cetakan berbahasa mandarin diharamkan serta diskusi yang berkaitan dengan SARA ditabukan. (Hoon, 2012)

1. Hegemoni Pihak Pemerintah

Tonggak yang melekat pada Soeharto untuk menutup habis semua hal berbau Tionghoa berimbas juga dengan adanya Aksi masa, hingga adanya penghancuran semua toko yang dimiliki oleh Tionghoa,

memang masyarakat sipil yang melakukan namun, hal ini ada karena adanya kekecewaan dari pemerintah itu sendiri

“hanya tiga jam yang dibutuhkan untuk mengubah papa yang mempunyai penghasilan tetap menjadi papa yang tidak punya apa-apa. Bangkrut mendadak. Dulu, penghasilan “Sinar Berjaya” itu benar benar Berjaya karena mampu menyekolahkan mereka berempat, menjadi sarjana. (Clara, 2012) Adalah salah satu bukti ketidakadilan yang dialami oleh Etnis Tionghoa, atas kekecewaan dari pemerintahan Soeharto yang berimbas adanya perusakan Toko milik Warga Etnis Tionghoa.

Sementara kita meninggalkan masa orde baru kita Tarik sejarah juga pada masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno Etnis Tionghoa mengalami deskriminasi. Dalam pandangan bayangan Nasionalis Indonesia, kebangsaan ganda berarti loyalitas politik orang Tionghoa pasti terbelah antara Indonesia dan China. Karena itu di dalam UU kewarganegaraan baru yang diumumkan pada

tahun 1958, yang mengadopsi “Sistem Aktif” dimana setiap warga negara Indonesia keturunan akan kehilangan kewarganegaraannya jika mereka tidak bersedia memberikan pernyataan resmi untuk menolak kewarganegaraan Cina. (Hoon, 2012)

Argumen tentang kewarganegaraan ini bisa dilihat bahwa walau lahir, besar di Indonesia tapi harus memiliki bukti-bukti sebagai penduduk asli Indonesia.

“paspor Indonesia, tapi tetap harus punya surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Harus punya bukti sebagai warga negara. Hahaha!, tawa Qian Xen menggelegar sinis sampai dia nyaris tersedak ludahnya “A yung A Yung lu bikin gua Shock sampai perlu kopi lagi”.(Clara, 2012)

Deskriminasi terhadap Etnis Tionghoa terlihat dalam kutipan diatas yang seharusnya warga yang lahir dan tinggal di Indonesia justru masalah administrasi dipersulit.

“mereka orang-orang yang katanya warga negara Indonesia tapi harus punya bukti warga negara. SBKRI bahkan sampai surat ganti nama” (Clara, 2012) Sampai nama yang menjadi identitas harus diganti di negara sendiri.

“nama Cina diberikan oleh Nung. Nama Indonesia diberikan oleh Mbok Heti. Lucu kedengarannya. Tapi Nung dan Anas memercayakan pembantu setianya untuk memberikan nama yang terbaik bagi empat putrinya. (Clara, 2012)

Masuk kembali kedalam masa Orde Baru, deskriminasi pun berlanjut. Sampai hari Imlek yang kita kenal sebagai lebaran Cina tidak termasuk

sebagai hari libur nasional. Hal ini membuat berbau ketimpangan tentang deskriminasi politik.

“makan dimsum pada pagi imlek dirayakan selama satu jam karena setelahnya mereka harus berangkat ke sekolah pukul 6.30. tidak ada libur imlek pada masa itu, masa pemerintahan Soeharto.” (Clara, 2012)

“hari raya besar dalam kebudayaan Cina. Tidak ada bedanya dengan muslim yang merayakan lebaran. Pemerintah zaman itu telah mengancam setiap sekolah diseluruh Jakarta agar memberikan peringatan keras kepada para murid keturunan Cina yang mencoba-coba tidak masuk sekolah dengan alasan Imlek.” (Clara, 2012)

Kutipan di atas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia sangat adanya kesenjangan antara Etnis Tionghoa dengan kaum pribumi, sampai Etnis tionghoa harus merelakan hari besarnya demi pekerjaan yang belum terdata pada hari besar nasional.

2. Hegemoni Masyarakat

Selain Pemerintah yang membuat kebijakan dengan meminggirkan Etnis Tionghoa, masyarakat biasa pun melakukan hal yang sama terhadap Etnis Tionghoa. Rasis menjadi dominasi pada permasalahan Hegemoni yang ada di dalam Novel ini.

“ternyata tidak siapa sangka waktu aku mau kasih duit ada lagi yang ngasih komentar di belakangku. Dasar Cina pelit ngasih duit selalu sedikit dengar seperti itu langsung saja darahku tancap gas ke ubun-ubun sialan benar aku

tersinggung sekali mendengarnya” (Clara, 2012)

Perlakuan pribumi di atas terlihat perlakuan rasis yang dialami Etnis Tionghoa bahkan sampai di cap sebagai orang yang pelit, dan menyamaratakan jika semua orang Cina/ etnis Tionghoa itu memiliki sifat pelit.

Rasisme yang ada di Indonesia bukan hanya orang yang sudah dewasa atau yang sudah mengerti kata “Rasisme” namun anak sekolah pun melakukan hal rasisme.

“Amoy, baris disini dong!, Novera pura-pura tidak mendengar walaupun dalam hati kupingnya panas mendengar panggilan yang menyebalkan itu entah kenapa gerombolan teman-teman lelaki dari kelasnya senang sekali menggodanya dengan panggilan Amoy. (Clara, 2012).

Pembicaraan yang seharusnya sadar diucapkan dan kata-kata yang tidak

pantas diucapkan. Amoy berarti wanita yang masih muda. Namun, pada kutipan diatas maksudnya menghina dengan berarti wanita penghibur.

Akhiran, bentuk hegemoni Terhadap etnis Tionghoa disini bukan hanya permasalahan sosial namun permasalahan politik yang berimbas menjadi Rasisme pada suatu Etnis. Pada intinya hegemoni yang ada pada Novel *Dimsum Terakhir* ini adanya bentuk kepemimpinan yang sewenang-wenangnya, dan pemisahan hegemoni kebudayaan. Sesuai dengan teori Hegemoni Gramsci bahwa adanya Hegemoni karena adanya suatu kepemimpinan negara dalam mengatur dan mengkoordinasikan negara yang lebih kecil. (Kurniawan, 2012) Secara singkatnya adalah adanya hegemoni karena adanya kepemimpinan yang lebih besar terhadap kaum/ kepemimpinan yang lebih kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang penulis buat dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa novel *Dimsum Terakhir* karya Clara Ng ini membuktikan adanya tindak Diskriminasi Etnis pada masa Orde lama dan memuncak pada Orde baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri secara gambaran besar membuat suatu Etnis

khususnya Etnis Tionghoa dipersulit dan ditekan keberadaanya.

Bukan hanya dari pihak pemerintah bahkan diskriminasi terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, mencela, memaki hingga melakukan kekerasan pada Etnis Tionghoa itu sendiri. seakan akan pada masa sebelum Reformasi Etnis Tionghoa tidak memiliki kedudukan di Indonesia.

REFERENSI

Hoon, Chang-Yau. 2012. *Identitas Tionghoa*. Jakarta: LP3ES,

Kurniawan, Heru. 2012. *Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
Ng, Clara. 2012. *Dimsum Terakhir*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sehandi, Yohanes. 2016. *Mengenal 25
Teori
Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.